STRATEGI PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI ATAS DRAINASE OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA

Yordani Laoly
NPP. 33.0766
Program Studi Praktik Perpolisian Dan Tata Pamong
Email: yordanilaoly1313@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. H. Khasan Effendy, M.Pd
Email: effendykhasan@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *Illegal buildings constructed on drainage channels in Palangka Raya City have become a recurring public order issue that disrupts drainage functions, increases the risk of urban flooding, and reduces environmental quality. Although the Civil Service Police Unit (Satpol PP) has conducted enforcement activities based on existing regulations, the implementation process continues to face challenges related to community resistance, limited organizational resources, and dynamic social conditions. Previous studies generally focused on legal enforcement, spatial planning, or infrastructure management, while limited attention has been given to understanding enforcement as a strategic organizational process.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the strategy for controlling illegal buildings on drainage channels implemented by the Civil Service Police Unit of Palangka Raya City and to identify the supporting and inhibiting factors affecting the sustainability of the strategy.* ***Method:*** *This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was carried out through semi-structured interviews with informants of Palangka Raya City Satpol pp officials and affected communities, as well as observation and documentation activities. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The analysis utilized the strategic management framework of Henry Mintzberg and James Brian Quinn, including the dimensions of plan, ploy, pattern, position, perspective, as well as deliberate strategy and emergent strategy.* ***Results:*** *The findings indicate that the enforcement strategy has been implemented through systematic stages, including strategic planning, persuasive approaches, consistent enforcement patterns, institutional positioning, and organizational values oriented toward public interest. The implementation reflects a combination of deliberate strategy and emergent strategy, allowing the organization to adapt to field conditions while maintaining regulatory objectives. However, the strategy has not yet achieved optimal effectiveness due to community resistance, limited personnel and operational capacity, and low levels of public compliance. Supporting factors include a clear legal framework and effective inter-agency coordination.* ***Conclusion:*** *The study concludes that the strategy for controlling illegal buildings on drainage channels in Palangka Raya City has been implemented in a structured manner based on the dimensions of Mintzberg and Quinn's strategic framework. Nevertheless, strengthening organizational capacity, improving public compliance, and enhancing collaborative governance are necessary to ensure the sustainability and effectiveness of future enforcement efforts.*

Keywords: *Civil Service Police Unit; Drainage; Enforcement Strategy; Illegal Buildings; Public Order.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Keberadaan bangunan liar di atas saluran drainase di Kota Palangka Raya menjadi permasalahan ketertiban umum yang berdampak terhadap terganggunya fungsi drainase, meningkatnya potensi banjir perkotaan, serta menurunnya kualitas lingkungan. Meskipun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melaksanakan penertiban berdasarkan ketentuan yang berlaku, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan berupa resistensi masyarakat, keterbatasan sumber daya organisasi, dan dinamika sosial di lapangan. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek penegakan hukum, tata ruang, maupun pengelolaan infrastruktur, sehingga masih terbatas penelitian yang menempatkan penertiban sebagai suatu proses strategi organisasi pemerintahan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penertiban bangunan liar di atas drainase oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan informan aparat Satpol pp Kota Palangka Raya dan masyarakat terdampak, serta kegiatan observasi, dan dokumentasi. terhadap informan yang berasal dari unsur Satpol PP serta masyarakat terdampak. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori strategi Henry Mintzberg dan James Brian Quinn yang meliputi dimensi plan, ploy, pattern, position, perspective, serta pendekatan deliberate strategy dan emergent strategy. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penertiban telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis yang mencakup perencanaan strategis, pendekatan persuasif kepada masyarakat, pola tindakan yang berulang, posisi kelembagaan yang jelas, serta nilai organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Implementasi strategi menunjukkan perpaduan antara deliberate strategy dan emergent strategy sehingga memungkinkan organisasi beradaptasi terhadap kondisi lapangan. Namun demikian, efektivitas strategi belum optimal karena masih terdapat resistensi masyarakat, keterbatasan personel dan kapasitas operasional, serta rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat. Faktor pendukung utama meliputi dasar hukum yang jelas dan koordinasi antarinstansi yang baik. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi penertiban bangunan liar di atas drainase oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya telah dilaksanakan secara terstruktur sesuai dimensi strategi Mintzberg dan Quinn, namun masih memerlukan penguatan kapasitas organisasi, peningkatan kepatuhan masyarakat, serta penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan strategi penertiban.

Kata Kunci: Bangunan Liar; Drainase; Ketertiban Umum; Satpol PP; Strategi Penertiban.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan wilayah perkotaan yang berlangsung secara cepat sering kali diikuti oleh munculnya berbagai permasalahan tata ruang dan ketertiban umum. Salah satu permasalahan yang banyak ditemukan di berbagai kota adalah keberadaan bangunan liar yang memanfaatkan ruang publik tanpa izin, termasuk bangunan yang berdiri di atas saluran drainase. Kondisi tersebut tidak hanya melanggar ketentuan pemanfaatan ruang, tetapi juga berpotensi mengganggu fungsi infrastruktur perkotaan, meningkatkan risiko banjir, serta menurunkan kualitas lingkungan hidup masyarakat. Dalam perspektif tata kelola perkotaan, pemanfaatan ruang yang tidak terkendali dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (UN-Habitat, 2022).

Permasalahan bangunan liar pada fasilitas umum merupakan fenomena yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga ditemukan di berbagai negara berkembang yang mengalami pertumbuhan perkotaan yang pesat. Fenomena tersebut juga dijelaskan oleh Porter et al. (2011) yang menyatakan bahwa perkembangan pembangunan informal di kawasan perkotaan berkaitan erat dengan tata kelola lahan, kapasitas kelembagaan pemerintah, serta efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang. Sementara itu, Bhan (2009) menegaskan bahwa penanganan kawasan informal memerlukan keseimbangan antara penegakan regulasi dan perlindungan kepentingan masyarakat yang terdampak oleh kebijakan penataan ruang. Penelitian Roy (2005) menjelaskan bahwa perkembangan permukiman dan bangunan informal merupakan konsekuensi dari dinamika urbanisasi yang sering kali tidak diimbangi oleh kapasitas pemerintah dalam melakukan pengendalian ruang secara efektif. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan perkotaan. Sementara itu, Watson (2009) menegaskan bahwa tantangan utama pemerintah daerah dalam pengelolaan perkotaan modern terletak pada kemampuan menyeimbangkan aspek penegakan regulasi dengan kebutuhan sosial masyarakat yang terdampak oleh kebijakan penataan ruang (Watson, 2009). Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penanganan kawasan informal memerlukan keseimbangan antara penegakan regulasi, perlindungan hak masyarakat, dan kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan (Huchzermeyer, 2008).

Kota Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah juga menghadapi permasalahan serupa. Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk, kebutuhan masyarakat terhadap ruang usaha maupun tempat tinggal terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat memanfaatkan area yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan, termasuk pada kawasan drainase perkotaan. Keberadaan bangunan liar di atas drainase mengakibatkan terganggunya fungsi saluran air sebagai infrastruktur pengendali banjir dan sarana pendukung sanitasi lingkungan. Berdasarkan laporan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2025, pelaksanaan penertiban telah dilakukan pada sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Yos Sudarso, Jalan RTA Milono, Jalan G. Obos, dan kawasan Pasar Besar dengan jumlah bangunan yang ditertibkan mencapai lebih dari seratus bangunan semi permanen. Namun demikian, pelaksanaan penertiban masih menghadapi berbagai kendala berupa resistensi masyarakat, keterbatasan sumber daya organisasi, serta tuntutan publik terhadap konsistensi penegakan aturan.

Dalam sistem pemerintahan daerah, tugas penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan bagian dari fungsi pemerintahan dalam menjaga keteraturan sosial, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan masyarakat sebagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Ndraha, 2011). Oleh karena itu, penanganan bangunan liar di atas drainase tidak hanya dapat dipandang sebagai aktivitas penegakan hukum semata, tetapi juga sebagai bagian dari strategi organisasi pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban umum dan menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur publik. Strategi menjadi aspek penting karena keberhasilan penertiban tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam merencanakan tindakan, membangun koordinasi, mengelola resistensi masyarakat, dan beradaptasi terhadap dinamika lingkungan yang terus berkembang (Mintzberg & Quinn, 1991).

Penelitian terdahulu umumnya membahas penertiban bangunan liar dari perspektif penegakan hukum, tata ruang, maupun efektivitas kebijakan publik. Namun demikian, masih relatif sedikit penelitian yang menganalisis penertiban bangunan liar menggunakan perspektif strategi organisasi pemerintahan. Padahal, menurut Mintzberg (1987), strategi tidak hanya dipahami sebagai perencanaan formal, tetapi juga sebagai pola tindakan yang berkembang melalui interaksi antara organisasi dan lingkungan eksternalnya. Dengan demikian, penertiban bangunan liar dapat dipahami sebagai suatu

strategic action yang melibatkan proses perencanaan, pelaksanaan, adaptasi, serta pembentukan pola tindakan organisasi secara berkelanjutan (Mintzberg, 1987).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Permasalahan masih ditemukannya bangunan liar yang berdiri di atas saluran drainase di Kota Palangka Raya meskipun pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melaksanakan berbagai upaya penertiban. Keberadaan bangunan liar pada fasilitas publik tersebut tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang, tetapi juga berdampak pada terganggunya fungsi drainase, meningkatnya potensi genangan dan banjir perkotaan, serta menurunnya kualitas lingkungan permukiman masyarakat. Dalam konteks tata kelola perkotaan, pengendalian pemanfaatan ruang menjadi salah satu tantangan utama pemerintah daerah karena harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan, kebutuhan masyarakat, dan penegakan regulasi yang berlaku (Watson, 2009).

Fenomena bangunan liar di kawasan perkotaan merupakan persoalan yang banyak ditemukan pada negara berkembang. Roy (2005) menjelaskan bahwa perkembangan bangunan dan permukiman informal sering kali muncul sebagai konsekuensi dari urbanisasi yang berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan pemerintah dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah menghadapi tantangan dalam menjaga fungsi ruang publik sekaligus memenuhi tuntutan sosial ekonomi masyarakat yang memanfaatkan ruang secara informal. Pada tingkat lokal, kondisi yang serupa juga terjadi di Kota Palangka Raya, di mana bangunan liar masih ditemukan pada kawasan drainase meskipun kegiatan penertiban telah dilakukan secara berkala oleh Satpol PP Kota Palangka Raya. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penertiban telah dilakukan melalui tahapan sosialisasi, teguran lisan, teguran tertulis, surat peringatan, hingga pembongkaran sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, permasalahan bangunan liar masih tetap ditemukan sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan penertiban dengan kondisi aktual di lapangan (Roy, 2005).

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan strategi penertiban belum mencapai hasil yang optimal. Resistensi masyarakat masih menjadi tantangan utama karena sebagian bangunan yang ditertibkan digunakan sebagai tempat tinggal maupun sumber mata pencaharian. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel, sarana operasional, dan kapasitas organisasi turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan penertiban. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan pemanfaatan ruang juga menyebabkan potensi munculnya kembali bangunan liar setelah kegiatan penertiban dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan penertiban bangunan liar tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam mengelola perubahan di masyarakat. Penelitian mengenai pengendalian ruang perkotaan menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan penertiban tidak hanya dipengaruhi oleh instrumen hukum, tetapi juga oleh kapasitas organisasi pemerintah dalam membangun kolaborasi, memperoleh legitimasi publik, dan mengelola konflik yang muncul selama implementasi kebijakan (Porter et al., 2011).

Kesenjangan penelitian juga ditemukan pada kajian-kajian sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas bangunan liar dari perspektif penegakan hukum, tata ruang, implementasi kebijakan, atau pengelolaan lingkungan perkotaan. Padahal, keberhasilan penertiban tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam merumuskan strategi, membangun pola tindakan yang konsisten, mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan, serta menyesuaikan kebijakan terhadap dinamika yang berkembang di lapangan (Mintzberg & Quinn, 1991). Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian yang mengkaji penertiban bangunan liar sebagai suatu strategi organisasi pemerintahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan menganalisis strategi penertiban bangunan liar di atas drainase oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya menggunakan perspektif strategi Mintzberg dan Quinn. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana strategi dirumuskan, diimplementasikan, dan dikembangkan dalam menghadapi berbagai tantangan penertiban di lapangan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena permasalahan bangunan liar di atas drainase tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan daerah, tetapi juga berdampak langsung terhadap fungsi infrastruktur publik dan kualitas lingkungan perkotaan. Drainase merupakan salah satu sarana penting dalam sistem pengendalian banjir dan pengelolaan air perkotaan. Apabila keberadaan bangunan liar terus dibiarkan, maka kapasitas drainase dalam mengalirkan air akan semakin berkurang sehingga berpotensi menimbulkan genangan, banjir, kerusakan lingkungan, serta mengganggu kenyamanan masyarakat. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus dijalankan secara berkelanjutan (Eviany & Sutiyo, 2023). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi yang digunakan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan tersebut agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Secara akademis, penelitian ini penting karena memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian strategi organisasi pemerintahan, khususnya dalam konteks penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas bangunan liar dari perspektif hukum, tata ruang, dan implementasi kebijakan publik. Sementara itu, penelitian yang menganalisis penertiban bangunan liar menggunakan perspektif strategi organisasi masih relatif terbatas. Pentingnya kapasitas organisasi pemerintah dalam mengelola persoalan perkotaan juga dikemukakan oleh Healey (2006) yang menjelaskan bahwa keberhasilan tata kelola perkotaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi publik dalam membangun koordinasi, adaptasi, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (Healey, 2006). Melalui penggunaan teori strategi Mintzberg dan Quinn yang meliputi dimensi plan, ploy, pattern, position, perspective, serta implementasi deliberate strategy dan emergent strategy, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam memahami proses penertiban yang dilakukan oleh organisasi pemerintah daerah (Mintzberg & Quinn, 1991).

Secara praktis, penelitian ini penting sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam meningkatkan efektivitas strategi penertiban bangunan liar di atas drainase. Hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan kapasitas organisasi, serta pengembangan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lainnya yang menghadapi permasalahan serupa dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan ketertiban umum.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah akan memiliki keterbatasan informasi empiris mengenai efektivitas strategi penertiban yang selama ini diterapkan. Akibatnya, proses evaluasi kebijakan dan perbaikan strategi berpotensi tidak berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dapat menyebabkan permasalahan bangunan liar terus berulang, fungsi drainase semakin terganggu, dan tujuan penyelenggaraan ketertiban umum serta perlindungan infrastruktur publik menjadi lebih sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk

menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi penertiban bangunan liar di atas drainase oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pembanding untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan serta mengidentifikasi aspek-aspek yang belum banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran literatur, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis strategi penertiban bangunan liar di atas drainase oleh Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan perspektif strategi organisasi menurut Mintzberg dan Quinn. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Juwanita Dewi (2025) dengan judul *Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penertiban Bangunan Liar di Kota Sukabumi* menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan penertiban bangunan liar melalui fungsi pengawasan, koordinasi, dan penegakan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penertiban dipengaruhi oleh sinergi antarinstansi dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai penertiban bangunan liar. Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya membahas peran pemerintah daerah, tetapi juga menganalisis strategi yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban bangunan liar di atas drainase.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Hafiz Ramdhani Barus (2025) dengan judul *Analisis Kebijakan Penertiban Bangunan di Atas Drainase Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 dalam Perspektif Fiqih Siyasah* menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban bangunan di atas drainase menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya kepatuhan terhadap peraturan, serta perlunya pendekatan persuasif dalam proses penertiban. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu bangunan liar di atas drainase. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan teori strategi organisasi untuk menganalisis upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, sedangkan penelitian Barus menggunakan perspektif Fiqih Siyasah dalam menganalisis kebijakan yang diterapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Märit Jansson (2012) dengan judul *Strategy for Implementing the Regulation of Illegal Buildings to Improve the Quality of Open Spaces in the Panakkukang District Area, Makassar City* menunjukkan bahwa implementasi regulasi bangunan liar memerlukan strategi yang terencana, koordinasi antarinstansi, pengawasan yang berkelanjutan, serta dukungan masyarakat untuk meningkatkan kualitas ruang terbuka perkotaan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif strategi dalam penanganan bangunan liar. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada strategi Satpol PP dalam menertibkan bangunan liar di atas drainase berdasarkan teori Five Ps for Strategy dari Mintzberg, sedangkan penelitian Jansson berorientasi pada implementasi regulasi untuk peningkatan kualitas ruang terbuka.

Penelitian yang dilakukan oleh Hilyatun Hasanah (2024) dengan judul *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan Liar di Kabupaten Karawang* menunjukkan bahwa efektivitas kinerja Satpol PP dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kemampuan komunikasi dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai penertiban bangunan liar yang dilakukan oleh Satpol PP. Perbedaannya, penelitian Hasanah berfokus pada efektivitas kinerja organisasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi yang digunakan Satpol PP dalam melaksanakan penertiban bangunan liar di atas drainase.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Pandiangan (2019) dengan judul *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau* menunjukkan bahwa Satpol PP berperan dalam penegakan peraturan daerah melalui kegiatan sosialisasi, pengawasan, dan penertiban bangunan liar. Penelitian tersebut juga menemukan adanya hambatan berupa rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan personel, dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai penertiban bangunan liar oleh Satpol PP. Perbedaannya, penelitian Pandiangan berfokus pada peran organisasi, sedangkan penelitian ini menganalisis strategi organisasi yang digunakan Satpol PP Kota Palangka Raya dalam menertibkan bangunan liar di atas drainase.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati, Akbar, dan Abas (2024) berjudul *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima untuk Menjamin Ketertiban Umum di Kabupaten Karawang* menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan ketertiban umum sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi petugas, koordinasi antarinstansi, serta dukungan masyarakat. Meskipun objek penelitian tersebut berfokus pada pedagang kaki lima, hasil penelitian memberikan gambaran mengenai pentingnya pendekatan persuasif dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek penertiban yang diteliti, yaitu bangunan liar yang berada di atas drainase.

Penelitian Pandiangan, Kadir, dan Lubis (2024) yang berjudul *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan Liar di Kabupaten Karawang* menunjukkan bahwa efektivitas penertiban sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana, serta koordinasi kelembagaan. Penelitian tersebut lebih berorientasi pada pengukuran efektivitas kinerja organisasi, sedangkan penelitian ini berupaya menjelaskan strategi yang digunakan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan pelaksanaan penertiban bangunan liar di lapangan.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada peran Satpol PP, efektivitas penegakan peraturan daerah, implementasi kebijakan, dan penertiban sebagai fungsi kelembagaan pemerintah daerah. Sementara itu, penelitian mengenai penertiban bangunan liar yang dianalisis menggunakan perspektif strategi organisasi melalui dimensi *plan, ploy, pattern, position,* dan *perspective* menurut Mintzberg dan Quinn masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut sekaligus memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami strategi penertiban bangunan liar di atas drainase oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah pada perspektif analisis yang digunakan dalam mengkaji penertiban bangunan liar di atas drainase oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas permasalahan bangunan liar dari sudut pandang implementasi kebijakan, penegakan hukum, peran organisasi, penerapan sanksi administrasi, maupun penataan ruang. Meskipun penelitian tersebut memberikan kontribusi yang penting dalam memahami pelaksanaan penertiban, kajian yang menempatkan penertiban sebagai suatu strategi organisasi pemerintahan masih relatif terbatas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori strategi Henry Mintzberg dan James Brian Quinn untuk menganalisis strategi penertiban bangunan liar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini memandang penertiban tidak hanya sebagai pelaksanaan peraturan daerah, tetapi juga sebagai bentuk *strategic action* yang melibatkan proses perencanaan, penyusunan taktik, pembentukan pola tindakan, penegasan posisi kelembagaan, serta pengembangan perspektif organisasi dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang di lapangan. Analisis dilakukan

melalui dimensi *plan, ploy, pattern, position,* dan *perspective* sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi organisasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

Selain itu, penelitian ini juga menawarkan kebaruan melalui penggunaan konsep *deliberate strategy* dan *emergent strategy* untuk menjelaskan bagaimana strategi penertiban tidak hanya dibentuk berdasarkan perencanaan formal organisasi, tetapi juga berkembang secara adaptif sebagai respons terhadap kondisi sosial, resistensi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya yang dihadapi selama proses pelaksanaan penertiban. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian strategi organisasi dalam pemerintahan daerah, khususnya pada bidang penegakan ketertiban umum dan perlindungan fungsi fasilitas publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Ilmu Pemerintahan Terapan, terutama dalam memahami hubungan antara strategi organisasi, efektivitas penertiban, dan keberlanjutan penyelenggaraan ketertiban umum pada tingkat pemerintahan daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penertiban bangunan liar di atas drainase yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya .

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam strategi penertiban bangunan liar di atas drainase yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya serta berbagai dinamika yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perilaku, tindakan, dan pengalaman para aktor yang terlibat dalam proses penertiban sehingga fenomena yang diteliti dapat dianalisis secara kontekstual (Creswell, 2018).

Fokus penelitian mengacu pada teori strategi yang dikemukakan oleh Mintzberg dan Quinn (1991), yang terdiri atas dimensi *plan, ploy, pattern, position,* dan *perspective*. Selain itu, penelitian juga menggunakan konsep *deliberate strategy* dan *emergent strategy* untuk menganalisis bagaimana strategi penertiban dirumuskan dan dikembangkan dalam menghadapi berbagai kondisi yang muncul selama pelaksanaan penertiban bangunan liar di atas drainase. Dimensi-dimensi tersebut digunakan sebagai pedoman dalam proses pengumpulan, pengelompokan, dan analisis data penelitian (Mintzberg & Quinn, 1991).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan penertiban bangunan liar, meliputi pejabat dan personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya serta masyarakat yang terdampak oleh kegiatan penertiban. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen pendukung seperti peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, dokumen kelembagaan, arsip penertiban, serta berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara (semi terstruktur), observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai strategi yang diterapkan, hambatan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penertiban. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi lapangan, pelaksanaan kegiatan penertiban, serta kondisi bangunan liar yang berada di atas drainase. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi

data penelitian melalui penelaahan berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan penertiban bangunan liar di Kota Palangka Raya.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Reduksi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan informasi yang relevan sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang diperoleh selama penelitian (Miles et al., 2014). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2023).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi penertiban bangunan liar di atas drainase oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, surat peringatan, hingga pembongkaran bangunan yang melanggar. Berdasarkan analisis menggunakan teori strategi Henry Mintzberg dan James Brian Quinn, strategi tersebut tidak hanya bersifat *deliberate strategy* (direncanakan), tetapi juga berkembang menjadi *emergent strategy* (adaptif) akibat berbagai dinamika yang muncul di lapangan.

Pelaksanaan penertiban menghadapi sejumlah kendala, seperti resistensi masyarakat terhadap pembongkaran bangunan serta keterbatasan sumber daya organisasi, khususnya jumlah personel dan kapasitas pengawasan. Kondisi ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara strategi yang telah direncanakan dengan implementasinya di lapangan.

Tabel 1
Data Penertiban Bangunan Liar di Atas Drainase Tahun 2023–2025

NO	TAHUN	JUMLAH BANGUNAN TERLAPOR	JUMLAH BANGUNAN DITERTIBKAN	PRESENTASE PENERTIBAN
1	2023	845	560	66,3%
2	2024	945	640	66,3%
3	2025	1.077	710	65,9%

Sumber : Diolah dari data Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, 2025

Data tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa jumlah bangunan liar yang terlapor terus meningkat dari 845 menjadi 1.077 bangunan. Meskipun jumlah bangunan yang ditertibkan juga mengalami peningkatan, persentase keberhasilan penertiban relatif stagnan pada kisaran 65–66 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas strategi penertiban belum mengalami peningkatan yang signifikan dan belum mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah pelanggaran.

Secara keseluruhan, strategi penertiban yang diterapkan telah berjalan sesuai prosedur dan menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap kondisi lapangan. Namun, masih terdapat strategic gap antara target pemerintah dalam mewujudkan ketertiban ruang kota dengan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas organisasi, peningkatan pengawasan, serta optimalisasi

pendekatan kepada masyarakat agar pelaksanaan penertiban dapat berlangsung lebih efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

3.1. Strategi Penertiban Bangunan Liar pada Dimensi *Plan*

Dimensi *plan* menurut Mintzberg memandang strategi sebagai suatu rencana yang disusun secara sadar untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks penelitian ini, strategi penertiban bangunan liar di atas drainase oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya menunjukkan adanya proses perencanaan yang dirumuskan secara sistematis sebagai bagian dari upaya penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum (Mintzberg, 1991)

Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP Kota Palangka Raya telah memiliki perencanaan strategis yang menjadi dasar pelaksanaan penertiban bangunan liar di atas drainase. Perencanaan tersebut disusun melalui program kerja tahunan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi organisasi serta berlandaskan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat. Keberadaan dasar hukum tersebut memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan penertiban sekaligus menjadi pedoman bagi aparatur dalam mengambil tindakan di lapangan (Pemerintah Kota Palangka Raya, 2024).

Tabel 2
Jumlah Bangunan Liar di Atas Drainase di Kota Palangka Raya 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH BANGUNAN	KETERANGAN
1.	Pahandut	472	JL. RTA Milono (Kawasan Pusat Kota)
2.	Jekan Raya	556	Jalan Seth Adji, Jalan C. Mihing
3.	Sebangau	16	Permukiman warung pinggiran drainase lingkungan
4.	Bukit Batu	30	Kawasan permukiman berkembang
5.	Rakumpit	3	Daerah pemukiman skala kecil

Sumber: Diolah dari data penertiban Satpol PP Kota Palangka Raya tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2, persebaran bangunan liar di atas drainase di Kota Palangka Raya tidak terjadi secara merata pada seluruh wilayah kecamatan. Kecamatan Jekan Raya memiliki jumlah bangunan liar tertinggi yaitu sebanyak 556 bangunan, diikuti Kecamatan Pahandut sebanyak 472 bangunan. Sementara itu, Kecamatan Sebangau, Bukit Batu, dan Rakumpit memiliki jumlah yang relatif lebih sedikit, masing-masing sebanyak 16, 30, dan 3 bangunan.

Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan bangunan liar di atas drainase terkonsentrasi pada wilayah perkotaan yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut merupakan kawasan yang berkembang sebagai pusat permukiman, perdagangan, dan jasa sehingga memiliki tekanan pemanfaatan ruang yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya.

Dalam perspektif dimensi *plan* menurut Mintzberg, data persebaran bangunan liar tersebut menjadi dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam menyusun prioritas penertiban. Perencanaan tidak hanya berfokus pada penegakan peraturan daerah secara umum, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kerawanan pelanggaran, dampak terhadap fungsi drainase, serta urgensi penanganan pada masing-masing wilayah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tujuan utama penertiban bukan hanya untuk menegakkan peraturan daerah, tetapi juga menjaga fungsi drainase agar tetap mampu mengalirkan air secara optimal sehingga dapat mengurangi risiko genangan dan banjir pada kawasan permukiman masyarakat. Selain itu, penertiban dilakukan untuk memastikan ruang publik dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta mencegah berkembangnya bangunan yang berpotensi mengganggu ketertiban lingkungan perkotaan. Temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan yang disusun Satpol PP tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan lingkungan dan kepentingan publik secara lebih luas.

Dalam perspektif strategi, perencanaan yang baik menjadi fondasi utama bagi efektivitas pelaksanaan program organisasi. Bryson (2018) menjelaskan bahwa perencanaan strategis membantu organisasi sektor publik dalam menentukan arah tindakan, mengalokasikan sumber daya, dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghadapi tantangan lingkungan yang dinamis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Palangka Raya telah memiliki arah strategis yang jelas dalam pelaksanaan penertiban (Bryson, 2018). Namun demikian, keberhasilan implementasi strategi tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam menerjemahkan rencana tersebut ke dalam tindakan yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dimensi *plan*, strategi penertiban bangunan liar di atas drainase oleh Satpol PP Kota Palangka Raya telah menunjukkan adanya perencanaan yang terstruktur, memiliki tujuan yang jelas, serta didukung oleh dasar hukum yang memadai. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perencanaan yang telah disusun masih menghadapi berbagai tantangan dalam tahap implementasi sehingga diperlukan dukungan strategi lanjutan agar tujuan penertiban dapat tercapai secara optimal.

3.2. Strategi Penertiban Bangunan Liar pada Dimensi *Ploy*

Menurut Mintzberg, dimensi *ploy* memandang strategi sebagai suatu taktik atau manuver yang digunakan organisasi untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penertiban bangunan liar di atas drainase, dimensi *ploy* tercermin melalui berbagai pendekatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya untuk mengurangi resistensi masyarakat sekaligus memastikan proses penertiban dapat berjalan dengan tertib dan kondusif (Mintzberg, 1987).

Tabel 3

Taktik yang Digunakan dalam Penertiban

TAKTIK	TUJUAN	HASIL
Sosialiasi	Memberikan pemahaman kepada masyarakat	Penyampaian informasi yang jelas untuk mengurangi resistensi
Pendekatan Persuasif	Meningkatkan kesadaran masyarakat	Sebagian masyarakat kooperatif
Teguran Lisan	Peringatan awal	Pemahaman awal terhadap pelanggaran yang dilakukan
Teguran Tertulis	Penegasan pelanggaran	Upaya dari tindakan non-yustisi

Surat Peringatan	Tahap sebelum pembongkaran	Pemberian waktu untuk melaksanakan pembongkaran mandiri

Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil penelitian, 2026.

Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP Kota Palangka Raya tidak langsung melakukan tindakan pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar ketentuan. Sebaliknya, organisasi lebih dahulu menerapkan berbagai langkah persuasif melalui sosialisasi, penyampaian informasi, pendekatan personal kepada masyarakat, serta pemberian kesempatan kepada pemilik bangunan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Strategi tersebut dilakukan untuk meminimalkan potensi konflik sosial yang dapat muncul selama proses penertiban berlangsung.

Pendekatan persuasif menjadi salah satu taktik yang paling dominan digunakan oleh Satpol PP. Sebelum tindakan penertiban dilaksanakan, petugas melakukan komunikasi secara intensif dengan masyarakat yang terdampak melalui pemberian teguran lisan, teguran tertulis, hingga surat peringatan. Melalui tahapan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai fungsi drainase sebagai fasilitas publik, dampak negatif keberadaan bangunan liar terhadap lingkungan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila pelanggaran tetap dilakukan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi penertiban tidak semata-mata berorientasi pada penggunaan kewenangan koersif, tetapi juga menekankan aspek edukatif dan preventif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan persuasif digunakan sebagai bentuk adaptasi organisasi terhadap kondisi sosial masyarakat. Sebagian bangunan liar yang ditertibkan digunakan sebagai tempat usaha maupun penunjang kebutuhan ekonomi keluarga sehingga tindakan penertiban berpotensi menimbulkan penolakan dari masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP berupaya membangun komunikasi yang baik agar masyarakat memahami tujuan penertiban dan bersedia bekerja sama dalam proses pelaksanaannya. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Bryson (2018) yang menyatakan bahwa organisasi sektor publik perlu mengembangkan strategi kolaboratif untuk memperoleh dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan organisasi (Bryson, 2018).

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi persuasif belum sepenuhnya mampu menghilangkan resistensi masyarakat. Masih terdapat sebagian pemilik bangunan yang menolak pelaksanaan penertiban meskipun telah diberikan sosialisasi dan surat peringatan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas strategi *ploy* sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat, kondisi sosial ekonomi, serta kemampuan organisasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dijalankan.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dimensi *ploy* dalam strategi penertiban bangunan liar di atas drainase diwujudkan melalui penggunaan pendekatan persuasif, komunikasi intensif, sosialisasi, serta pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penyesuaian secara mandiri sebelum tindakan penertiban dilaksanakan. Strategi tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Palangka Raya tidak hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga mengedepankan upaya preventif dan humanis guna menjaga stabilitas sosial selama proses penertiban berlangsung.

3.3. Strategi Penertiban Bangunan Liar pada Dimensi *Pattern*

Dimensi *pattern* dalam teori Mintzberg menempatkan strategi sebagai pola tindakan yang dilakukan secara berulang dan konsisten dalam pelaksanaan tugas organisasi. Strategi tidak hanya dipahami sebagai rencana yang dirumuskan sebelumnya, tetapi juga sebagai pola perilaku organisasi yang dapat diamati melalui tindakan yang dilakukan secara terus-menerus dalam menghadapi suatu permasalahan (Mintzberg, 1987). Dalam penelitian ini, dimensi *pattern* dianalisis untuk melihat bagaimana pola pelaksanaan penertiban bangunan liar di atas drainase yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Palangka Raya telah membentuk pola tindakan yang relatif konsisten dalam melaksanakan penertiban bangunan liar di atas drainase. Pola tersebut dilakukan melalui tahapan administratif dan operasional yang berulang pada setiap kegiatan penertiban. Tahapan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3
Pola Tahapan Penertiban Bangunan Liar di Atas Drainase

TAHAPAN	BENTUK KEGIATAN
Tahap I	Teguran lisan kepada pemilik bangunan
Tahap II	Teguran tertulis dan sosialisasi
Tahap III	Pemberian surat peringatan
Tahap IV	Penertiban atau pembongkaran bangunan
Tahap V	Monitoring dan pengawasan pascapenertiban

Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil penelitian, 2026.

Pola tindakan tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP tidak serta-merta melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar ketentuan. Sebaliknya, organisasi menerapkan tahapan yang berjenjang dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap aturan yang berlaku. Pola tersebut sekaligus menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara penegakan peraturan daerah dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak oleh kegiatan penertiban.

Selain melalui tahapan administratif, pola strategi juga terlihat dari kegiatan patroli, monitoring lapangan, koordinasi antarinstansi, serta pengawasan pascapenertiban yang dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya kembali bangunan liar pada lokasi yang telah ditertibkan. Dengan demikian, strategi penertiban tidak berhenti pada tindakan pembongkaran semata, tetapi dilanjutkan dengan upaya menjaga keberlanjutan hasil penertiban yang telah dicapai.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pola tindakan yang telah dibangun belum sepenuhnya menghasilkan efektivitas yang optimal. Data penelitian menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kasus bangunan liar dari tahun ke tahun, sementara jumlah bangunan yang berhasil ditertibkan belum mengalami peningkatan yang signifikan. Persentase penertiban yang relatif stagnan menunjukkan adanya kesenjangan antara pola tindakan yang dirancang dengan hasil yang diperoleh di lapangan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pola strategi yang diterapkan masih

menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari lingkungan eksternal maupun keterbatasan internal organisasi.

Dalam perspektif Mintzberg dan Quinn (1991), kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi yang muncul dalam praktik organisasi tidak selalu identik dengan strategi yang direncanakan. Meskipun Satpol PP telah memiliki pola tindakan yang jelas dan berulang, dinamika sosial masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan meningkatnya jumlah pelanggaran menyebabkan hasil yang dicapai belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan strategis yang ditetapkan (Mintzberg & Quinn, 1991). Oleh karena itu, penguatan konsistensi pengawasan serta peningkatan kapasitas organisasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pola strategi penertiban di masa mendatang.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dimensi *pattern* dalam strategi penertiban bangunan liar di atas drainase telah tercermin melalui pola tindakan yang sistematis, berjenjang, dan dilakukan secara berulang. Akan tetapi, pola tersebut masih memerlukan penguatan agar mampu menghasilkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam mengendalikan pertumbuhan bangunan liar dan menjaga fungsi drainase sebagai fasilitas publik.

3.4. Strategi Penertiban Bangunan Liar pada Dimensi *Position* dan *Perspective*

Dimensi *position* menurut Mintzberg memandang strategi sebagai upaya organisasi dalam menentukan posisi yang tepat di lingkungan eksternal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, dimensi *perspective* melihat strategi sebagai cara pandang, nilai, dan budaya organisasi yang memengaruhi perilaku organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Mintzberg, 1987; Mintzberg & Quinn, 1991). Dalam penelitian ini, kedua dimensi tersebut digunakan untuk memahami bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya memosisikan dirinya dalam pelaksanaan penertiban bangunan liar di atas drainase serta nilai-nilai yang mendasari pelaksanaan strategi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP Kota Palangka Raya memosisikan diri sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Posisi tersebut menjadikan Satpol PP sebagai aktor utama dalam pelaksanaan penertiban bangunan liar yang berdiri di atas fasilitas publik. Dalam menjalankan fungsi tersebut, organisasi tidak hanya bertindak sebagai pelaksana penegakan hukum daerah, tetapi juga sebagai mediator yang berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat yang terdampak oleh kegiatan penertiban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban memerlukan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, antara lain perangkat daerah terkait, aparat keamanan, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, serta masyarakat setempat. Posisi Satpol PP dalam jaringan kerja tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penertiban tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal organisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan membangun kerja sama dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Bryson (2018) yang menyatakan bahwa organisasi sektor publik memerlukan kolaborasi antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari perspektif organisasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penertiban yang diterapkan oleh Satpol PP Kota Palangka Raya didasarkan pada nilai-nilai ketertiban, kepentingan publik, kepastian hukum, dan pendekatan humanis. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam pelaksanaan penertiban yang mengutamakan sosialisasi, komunikasi, dan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pembongkaran secara mandiri sebelum tindakan penertiban dilakukan.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa organisasi tidak semata-mata berorientasi pada penggunaan kewenangan koersif, tetapi juga berupaya membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga fungsi drainase dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa perspektif organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Keberadaan bangunan liar dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keberlanjutan fungsi fasilitas publik yang digunakan oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, tindakan penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan perkotaan, mengurangi risiko banjir, dan mewujudkan ketertiban umum yang berkelanjutan.

Dalam perspektif teori Mintzberg dan Quinn (1991), kesesuaian antara posisi organisasi dan perspektif yang dimiliki merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Palangka Raya telah memiliki posisi kelembagaan yang jelas serta perspektif organisasi yang mendukung pelaksanaan penertiban (Mintzberg & Quinn, 1991). Namun demikian, berbagai tantangan yang berasal dari lingkungan eksternal tetap memerlukan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan mengembangkan strategi secara berkelanjutan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dimensi *position* dan *perspective* dalam strategi penertiban bangunan liar di atas drainase telah tercermin melalui posisi Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah sekaligus pengelola ketertiban umum serta melalui nilai-nilai organisasi yang menekankan kepentingan publik, kepastian hukum, dan pendekatan humanis. Kedua dimensi tersebut menjadi landasan penting dalam pelaksanaan strategi penertiban yang efektif dan berkelanjutan.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penertiban bangunan liar di atas drainase oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dilaksanakan melalui dimensi *plan, ploy, pattern, position,* dan *perspective* sebagaimana dikemukakan oleh Mintzberg dan Quinn. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa implementasi strategi penertiban tidak hanya dijalankan berdasarkan perencanaan formal organisasi (*deliberate strategy*), tetapi juga berkembang melalui berbagai penyesuaian terhadap kondisi lapangan (*emergent strategy*). Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi penertiban merupakan proses yang dinamis dan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial, ekonomi, serta karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Sapidah dan Yuliani (2023) yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban bangunan liar dipengaruhi oleh faktor koordinasi kelembagaan, dukungan regulasi, dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Sama halnya dengan penelitian tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan penertiban sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam membangun koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat. Namun demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih luas karena tidak hanya melihat penertiban dari sisi implementasi kebijakan, tetapi juga dari sudut pandang strategi organisasi yang digunakan dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sandi Lukman Hakim (2023) yang menemukan bahwa pelaksanaan penertiban bangunan liar memerlukan tahapan yang sistematis dan sesuai prosedur. Kesamaan tersebut terlihat pada adanya pola tindakan yang berjenjang mulai dari sosialisasi, teguran, pemberian surat peringatan, hingga pelaksanaan penertiban. Akan tetapi,

penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan tersebut bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari strategi organisasi yang dirancang untuk mengurangi resistensi masyarakat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan penertiban.

Selanjutnya, hasil penelitian ini memperkuat temuan Denny Arihta Sembiring (2025) yang menyatakan bahwa resistensi masyarakat dan keterbatasan sumber daya organisasi menjadi hambatan utama dalam penertiban bangunan liar. Penelitian ini menemukan kondisi yang serupa, yaitu masih adanya penolakan dari sebagian masyarakat, keterbatasan personel, dan keterbatasan sarana operasional yang memengaruhi efektivitas strategi penertiban. Namun demikian, penelitian ini memberikan tambahan pemahaman bahwa berbagai hambatan tersebut mendorong munculnya *emergent strategy*, yaitu penyesuaian strategi yang dilakukan organisasi sebagai respons terhadap dinamika yang berkembang selama proses implementasi berlangsung.

Temuan penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Maliki Nuramdhani (2023) yang menunjukkan bahwa penertiban bangunan di atas drainase dilakukan melalui tahapan sosialisasi, teguran, dan pembongkaran sesuai ketentuan yang berlaku. Sama halnya dengan penelitian tersebut, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan persuasif menjadi bagian penting dalam pelaksanaan penertiban. Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya menjelaskan mekanisme penertiban, tetapi juga menganalisis alasan strategis di balik penggunaan pendekatan tersebut melalui dimensi *ploy* dan *perspective* yang dikemukakan oleh Mintzberg dan Quinn.

Penelitian Benny Eka Putra, Edi Haskar, dan Zuhdi Arman (2024) menegaskan pentingnya dukungan regulasi dalam pengendalian pelanggaran pemanfaatan ruang. Temuan tersebut juga ditemukan dalam penelitian ini, di mana keberadaan dasar hukum yang jelas menjadi salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan penertiban bangunan liar di atas drainase. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan penertiban apabila tidak didukung oleh strategi organisasi yang mampu beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan Porter et al. (2011) yang menjelaskan bahwa pengendalian pembangunan informal memerlukan kombinasi antara kapasitas kelembagaan, dukungan regulasi, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, de Magalhães (2010)menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan ruang perkotaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun tata kelola kolaboratif yang mampu menjembatani kepentingan publik dan kepentingan kelompok masyarakat yang terdampak kebijakan.

Berdasarkan perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memperkuat sebagian besar temuan penelitian sebelumnya mengenai pentingnya regulasi, koordinasi, dan pendekatan persuasif dalam pelaksanaan penertiban bangunan liar. Namun demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan penertiban sebagai suatu strategi organisasi yang dianalisis melalui dimensi *plan, ploy, pattern, position,* dan *perspective*, serta melalui interaksi antara *deliberate strategy* dan *emergent strategy*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian strategi organisasi pemerintahan, khususnya pada bidang penegakan ketertiban umum dan pengelolaan fasilitas publik di daerah.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah adanya kombinasi antara *deliberate strategy* dan *emergent strategy* dalam pelaksanaan penertiban bangunan liar di atas drainase oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. Secara teoritis, *deliberate strategy* merupakan strategi yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Dalam penelitian ini, bentuk *deliberate strategy* terlihat dari adanya dasar hukum yang jelas,

perencanaan kegiatan penertiban, penyusunan tahapan tindakan, serta pelaksanaan tugas yang mengacu pada prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam beberapa kegiatan penertiban, petugas menghadapi berbagai dinamika seperti penolakan masyarakat, keberatan dari pemilik bangunan, keterbatasan personel, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam. Situasi tersebut mendorong organisasi untuk melakukan berbagai penyesuaian strategi melalui pendekatan persuasif, komunikasi yang lebih intensif, serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat setempat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan tidak hanya bersifat formal dan terencana, tetapi juga berkembang secara adaptif mengikuti kondisi yang muncul selama proses implementasi berlangsung. Dengan kata lain, keberhasilan penertiban tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi dan kewenangan organisasi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam membaca situasi, mengelola konflik, dan menyesuaikan tindakan dengan kondisi yang dihadapi di lapangan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan humanis yang diterapkan Satpol PP memiliki peran penting dalam mengurangi potensi konflik selama proses penertiban. Pendekatan tersebut diwujudkan melalui sosialisasi, pemberian teguran secara bertahap, serta pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pembongkaran secara mandiri sebelum tindakan penertiban dilakukan. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan peraturan daerah tidak selalu identik dengan tindakan represif, tetapi juga dapat dilakukan melalui pendekatan komunikatif yang mengedepankan kepentingan publik dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut dapat dipahami bahwa strategi penertiban bangunan liar di atas drainase merupakan proses yang dinamis dan adaptif. Temuan ini memberikan kontribusi tambahan terhadap kajian strategi organisasi sektor publik dengan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kualitas perencanaan, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan tantangan yang muncul selama proses pelaksanaan.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa strategi penertiban bangunan liar di atas drainase oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya telah dilaksanakan melalui dimensi *plan, ploy, pattern, position,* dan *perspective* sebagaimana dikemukakan oleh Mintzberg dan Quinn. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban tidak hanya dilakukan sebagai bentuk penegakan peraturan daerah, tetapi juga sebagai upaya menjaga fungsi drainase, mencegah gangguan lingkungan, serta mewujudkan ketertiban umum. Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi strategi penertiban merupakan perpaduan antara *deliberate strategy* dan *emergent strategy*, di mana organisasi tidak hanya menjalankan strategi yang telah direncanakan, tetapi juga melakukan berbagai penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang di lapangan. Temuan tersebut memperluas kajian strategi organisasi pada sektor pemerintahan daerah, khususnya dalam pelaksanaan penegakan ketertiban umum dan pengelolaan fasilitas publik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya sehingga hasil penelitian menggambarkan kondisi yang terjadi pada lokasi penelitian dan belum dapat digeneralisasikan pada seluruh daerah yang memiliki karakteristik berbeda. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh kedalaman informasi yang diberikan oleh informan serta kondisi yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung. Ketiga, penelitian

lebih berfokus pada aspek strategi organisasi sehingga belum mengkaji secara mendalam aspek sosial ekonomi masyarakat yang terdampak oleh kegiatan penertiban.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian mengenai strategi penertiban bangunan liar masih memiliki ruang pengembangan yang luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji strategi penertiban pada daerah lain dengan karakteristik yang berbeda sehingga dapat dilakukan perbandingan antarwilayah. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur tingkat efektivitas strategi penertiban secara lebih komprehensif. Kajian mengenai dampak sosial ekonomi pascapenertiban serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah juga menarik untuk diteliti guna memperkaya pengembangan ilmu pemerintahan dan kebijakan publik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya beserta seluruh informan yang telah memberikan dukungan, data, informasi, dan kerja sama selama proses penelitian berlangsung. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada dosen pembimbing, keluarga, serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, motivasi, dan bantuan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Dewi, N. P. J. (2025). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penertiban Bangunan Liar di Kota Sukabumi . Bhirawa Law Journal, 6(2), 179–190. https://doi.org/10.26905/blj.v6i2.16332

Barus, M. H. R., & Marpaung, Z. A. (2025). Analisis kebijakan penertiban bangunan di atas drainase berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 dalam perspektif fiqih siyasah. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 4(8), 1029–1042. https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4396

Hasanah, H., Asyahadi, F., & Abas, M. (2024). Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 4*(6), 2779–2788. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2659

Jansson, M. (2012). A review of the concept “management” in relation to urban landscapes and green spaces: Toward a holistic understanding. Urban Forestry & Urban Greening, 11(2), 139–145. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2012.01.004

Pandiangan, A., Kadir, A., & Lubis, Y. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 1(1), 65–72. https://doi.org/10.31289/jipikom.v1i1.168

Savira, A., Isnawaty, N. W., & Karlina, N. (2023). Koordinasi dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara. JANE – Jurnal Administrasi Negara, 14(2).

https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45065

Watson, V. (2009). The Planned City Sweeps the Poor Away...: Urban Planning and 21st Century Urbanisation. *Progress in Planning*, *72*(3), 151–193. https://doi.org/10.1016/j.progress.2009.06.002

Bhan, G. (2009). This is No Longer the City I Once Knew: Evictions, the Urban Poor and the Right to the City in Millennial Delhi. *Environment and Urbanization*, *21*(1), 127–142. https://doi.org/10.1177/0956247809103009

Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations* (5th ed.). John Wiley \& Sons.

de Magalhães, C. (2010). Urban Regeneration, Property Rights and Local Governance. *Urban Studies*, *47*(1), 1–18. https://doi.org/10.1177/0042098009348324

Eva Eviany dan Sutiyo. (2023). Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan. Klaten & Makassar: PT. Nas Media Indonesia.

Huchzermeyer, M. (2008). Slum Upgrading in Nairobi within the Housing and Basic Services Market: A Housing Rights Concern. Journal of Asian and African Studies, 43(1), 19–39. https://doi.org/10.1177/0021909607085586

Mintzberg, H. (1991). *The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy*. California Management Review.

Porter, L., Lombard, M., Huxley, M., Ingram, M., & Islam, T. (2011). Informality, the Commons and the Paradoxes for Planning: Concepts and Debates for Informality and Planning. *Planning Theory \& Practice*, *12*(1), 115–153. https://doi.org/10.1080/14649357.2011.545626

Simangungsong, F. (2000). Pemerintahan Indonesia: Teori dan Praktek. Jakarta.

Roy, A. (2005). Urban Informality: Toward an Epistemology of Planning. *Journal of the American Planning Association*, *71*(2), 147–158. https://doi.org/10.1080/01944360508976689

Ndraha, T. (2011). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.

Nurdin, I. (2019). Kualitas Pelayanan Publik: Perilaku Aparatur dan Komunikasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Muhadam Labolo. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta: PT RajaGrafindo persada https://www.rajagrafindo.co.id/produk/memahami-ilmu-pemerintahan/